

Dukungan Fiskal Pada Sektor Pertanian dan Kedaulatan Pangan

Sektor penting yang mendukung tercapainya kedaulatan pangan diantaranya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini tampak dari besarnya kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja. Namun demikian, kontribusi nyata sektor pertanian termasuk peternakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung menurun. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2010, kontribusi sektor pertanian sekitar 11 persen, dan pada tahun 2014 nilai kontribusi sektor tersebut menurun lagi menjadi 10,3 persen. Tren yang sama juga terjadi pada kontribusi kelompok sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan atas besaran PDB. Dari sisi penyediaan lapangan pekerjaan, jumlah angkatan kerja nasional mencapai 122,4 juta pada tahun 2015. Penyerap tenaga kerja terbesar tetap pada sektor pertanian yang mencapai sekitar 32,9 persen, yang kemudian diikuti oleh sektor perdagangan 22,4 persen, jasa kemasyarakatan 15,6 persen, dan industri 13,3 persen.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 disebutkan bahwa sasaran kedaulatan pangan periode 2015-2019 diantaranya meliputi target produksi padi diharapkan dapat tercapai sebesar 82 juta ton, jagung 24,1 juta ton dan kedelai 1,92 juta ton. Terkait dengan kondisi tersebut, pemerintah terus mendorong sektor pertanian agar dapat mendukung tercapainya kedaulatan pangan. Yang dimaksud kedaulatan pangan adalah hak yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan sesuai potensi lokal (UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

Dukungan Fiskal

Berdasarkan postur APBN 2017, belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.080,4 triliun. Belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.315,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun. Dari total belanja pemerintah pusat, alokasi untuk belanja K/L sebesar Rp763,6 triliun, sedangkan sisanya sebesar Rp551,9 triliun untuk belanja non-K/L.

Di sisi belanja negara, beberapa strategi kebijakan yang dilakukan pemerintah diarahkan untuk meningkatkan belanja produktif (infrastruktur dan konektivitas), meningkatkan efisiensi belanja non operasional, meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial (Program Keluarga Harapan, Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Rastra, dan Bidik Misi), memperkuat program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan kedaulatan pangan.

Terkait dengan kedaulatan pangan, beberapa sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 meliputi peningkatan produksi pangan dalam negeri yang didukung dengan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian. Fokus produksi pangan

dalam negeri terutama pada produksi padi yang diharapkan mencapai 77 juta ton, jagung 22,4 juta ton dan lainnya (kedelai, gula, daging sapi) termasuk ikan.

Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2017 diperkirakan akan tumbuh sekitar 3,8%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan dapat mencapai 5,1 %. Adapun sasaran bidang kedaulatan pangan tahun 2017 secara detail adalah sebagai berikut: pembangunan infrastruktur berupa pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi pertanian. Pembangunan jaringan irigasi air permukaan, air tanah, dan rawa sebesar 9,18 juta ha, serta rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa sebesar 0,22 juta ha. Selanjutnya, seperti dijelaskan di atas, produksi pertanian difokuskan pada padi dengan target mencapai 77 juta ton, jagung 22,4 juta ton, kedelai, gula, daging sapi dan ikan. Upaya peningkatan kapasitas produksi pertanian seperti reformasi subsidi pupuk dan benih, rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi, rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi tersier untuk 100 ribu ha areal sawah, pembangunan waduk, pencetakan sawah baru 80 ribu ha, dan perluasan areal pangan, dan mitigasi terhadap gangguan cuaca.

Tabel 1 – Anggaran Infrastruktur, APBN 2016-2017

Uraian	2016	2017
Infrastruktur Ekonomi	307,2	378,2
1. Belanja K/L al.	151,2	154,1
Kemen PUPR	94,7	98,7
Kemen Perhubungan	39,9	42,1
Kemen Pertanian	4,1	2,3
Kemen ESDM	3,7	3,3
2. Belanja BA BUN	5,9	2,6
3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	88,0	183,7
4. Pembiayaan	62,1	37,8
Infrastruktur Sosial	5,7	5,5
Dukungan Infrastruktur	4,2	4,0
Jumlah	317,1	387,7

Sumber: Kemenkeu, 2017, diolah

Pendanaan atas infrastruktur pertanian tersebut dapat dilihat pada skema Anggaran Infrastruktur di bawah ini. Total dana yang dialokasikan pada tahun 2017 sebesar Rp387,7 triliun. Dalam skema Anggaran Infrastruktur, alokasi infrastruktur pertanian tersebar di Kementerian PUPR (Ditjen Sumber Daya Air), Kementerian Pertanian, dana DAK Pertanian dan DAK Irigasi (lihat Tabel 1 dan Tabel 2). Pada APBN 2017, jumlah dana anggaran infrastruktur pertanian mencapai sekitar Rp18,4 triliun, termasuk Ditjen Sumber Daya Air (Rp 10,4 triliun), serta dana DAK Irigasi dan Pertanian (Rp5,7 triliun). Dengan demikian, porsi dana anggaran

untuk infrastruktur pertanian hanya sekitar 4,7% dari total anggaran infrastruktur Rp387,7 triliun.

Tabel 2 – Anggaran Ketahanan Pangan, APBN 2016-2017

Uraian	2016	2017
K/L	42,3	40,7
1. Kemen Pertanian	27,6	22,1
2. Kemen Kelautan Perikanan	8,0	6,5
3. Kemen PUPR	6,7	10,4
4. Kemen Sosial	-	1,7
Non K/L	75,6	62,5
1. Subsidi	53,6	52,3
Subsidi Pangan	22,5	19,8
Subsidi Pupuk	30,1	31,2
Subsidi Benih	1,0	1,3
Subsidi Bunga Kredit	0,0	0,0
2. Belanja Lain-Lain	4,2	4,5
Cadangan Beras Pemerintah	2,0	2,5
Cadangan Stabilisasi Pangan	2,2	2,0
3. Transfer ke Daerah	17,8	5,7
DAK Irigasi	13,9	4,0
DAK Pertanian	3,9	1,7
Jumlah	117,9	103,2

Sumber: Kemenkeu, 2017, diolah

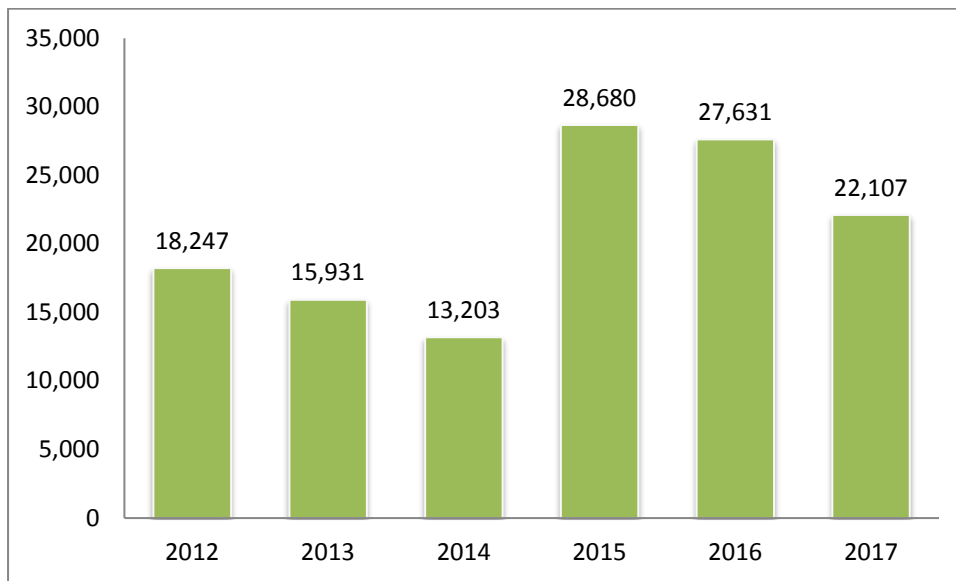
Dalam skema Anggaran Ketahanan Pangan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp103,2 triliun pada tahun 2017 untuk mencapai kedaulatan pangan. Dari Tabel 3, tampak alokasi dananya tersebar di berbagai Bagian Anggaran (BA). Total anggaran ketahanan pangan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp14,7 triliun daripada anggaran dalam APBNP tahun 2016. Penurunan cukup signifikan terjadi pada Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (sebesar Rp5,5 triliun) dan BA BUN khususnya DAK Irigasi (Rp9,9 triliun).

Penurunan juga terjadi pada alokasi dana untuk Subsidi pangan yang diperuntukkan bagi 14,3 juta Rumah Tangga Sasaran dengan kuantum 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan. Mulai tahun 2017 ini, pemberian subsidi pangan akan dilakukan non tunai secara bertahap kepada 1,4 juta RTS yang dialokasikan melalui Kemensos dan akan disinergikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kinerja Sektor Pertanian

Sektor pertanian tidak lepas dari peran dan tanggung jawab kementerian pertanian (Kementan) sebagai kementerian teknis yang membidangi sektor tersebut. Perkembangan anggaran kementerian tersebut dapat dilihat pada Grafik 3.

Grafik 3 - Perkembangan Anggaran Kementan, 2012-2017



Sumber: Kemenkeu, 2017, diolah

Beberapa program Kementan yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi adalah 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan prasarana Pertanian, 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dan 3) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Tahun 2016, program pertama memiliki indikator kinerja yaitu luas areal sawah yang jaringan irigasi tersiernya dibangun/direhabilitasi 100 ribu ha areal sawah, jumlah cetak sawah 80 ribu ha sawah, serta jumlah bantuan alat dan mesin pertanian 63.693 unit. Indikator kinerja program kedua yaitu luas lahan yang mendapat fasilitas penerapan budidaya jagung sebanyak 3 juta ha, luas penerapan budidaya kedelai 210 ribu ha, desa mandiri benih yang memperoleh pendampingan dan penguatan sebanyak 200 desa, dan penanganan dampak perubahan iklim pada 350 desa. Indikator kinerja pada program ketiga yaitu luas lahan penanaman dan pemeliharaan HPT di UPT sebanyak 13.323 ha, produksi pakan olahan sebanyak 12.429 ton, serta jumlah kelompok penerima bibit sapi potong dan sarana pendukungnya sebanyak 135 kelompok.

Capaian indikator kinerja pada ketiga program Kementan selama periode 2012 – 2015 adalah sebagai berikut. Capaian kinerja pada program pertama yaitu perluasan sawah seluas mencapai 199.513 ha, pengembangan optimasi lahan pertanian seluas 1,5 juta ha, dan pengembangan jaringan dan optimasi air seluas 3,9 juta ha. Program kedua memiliki indikator kinerja yaitu produksi padi selama periode tersebut mencapai 286,6 juta ton, jagung 76,5 juta ton, dan kedelai 3,5 juta ton. Indikator kinerja pada program ketiga yaitu produksi daging dari 2,67 juta ton tahun 2012 menjadi 3,62 juta ton tahun 2015, produksi telur dari 1,63 juta ton menjadi 1,82 juta ton serta produksi susu 0,96 juta ton menjadi 0,81 juta ton.

Berdasarkan paparan di atas, beberapa tantangan bagi pemerintah ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa program yang tersebar di berbagai kementerian terkait infrastruktur pertanian dapat efektif untuk mendukung tercapainya kedaulatan pangan hingga tahun 2019. Selain itu, bagaimana memastikan agar antar program terjadi harmonisasi sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan sehingga antar program memiliki keterkaitan dan kesinambungan hasil program yang diharapkan bisa efektif guna mendukung tercapainya berbagai sasaran kedaulatan pangan sebagaimana dikemukakan di atas.